

Judul : Agustus Tahun Depan Sudah Bisa Ditempati, Anggaran IKN Rp 37 Triliun
Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Anggaran IKN Rp 37 Triliun Agustus Tahun Depan Sudah Bisa Ditempati

BADAN Anggaran (Banggar) DPR telah memberi restu alokasi anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun 2023 sebesar Rp 37 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan IKN, sehingga tahun depan sudah bisa ditempati Presiden untuk berkantor.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, awalnya Banggar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk pembangunan IKN di tahun ini. Namun untuk percepatan, Pemerintah meminta penambahan anggaran, sehingga total alokasi anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN di tahun 2023 menjadi Rp 37 triliun.

"IKN tahun ini kami anggaran Rp 22 triliun dan Pemerintah akselerasi rambah Rp 15 triliun lagi untuk tahun ini juga, sehingga total sudah Rp 37 triliun yang Banggar setuju," kata Said dalam rapat kerja Banggar bersama 4 Menteri Koordinator (Menko) di Gedung Parlemen, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Said, Banggar menyetujui penambahan anggaran tersebut agar proyek pembangunan IKN bisa segera berjalan sesuai target.

"Supaya kita bulan Juni sesuai Undang-Undang (Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN) tahun 2024 sudah bisa ditempati oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Said mengapresiasi kerja-kerja Pemerintah untuk mewujudkan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Proyek strategis nasional ini sebelumnya mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) lewat Banggar sebanyak dua kali. "Dan terima kasih sudah ada kemajuan yang luar biasa," katanya.

Dia pun berharap, peresmian

operasi KCIC ini bisa terlaksana pada Juli nanti.

"Lebih-lebih tadi disampaikan bahwa itu semua adalah lokal konten sehingga nilai tambahnya luar biasa buat kita semua dan bulan Juli, Insya Allah kita akan saksikan peresmian kereta cepat nanti," jelasnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, proyek pengerjaan IKN dan KCIC semuanya berjalan terkendali. Dirinya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan IKN telah melakukan berbagai pengembangan IKN. Salah satunya terkait skema insentif dan model bisnis rencana pengembangan kawasan status tanah.

"Yang paling penting, pertama, 27 Juli ini saya targetnya harus selesai dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli," katanya.

Dia pun mengaku telah melakukan komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN seperti UEA, China hingga beberapa negara Timur Tengah.

"Kemarin di Singapura kita sudah jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua ingin masuk. Kami berharap, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara ke sana," katanya.

Luhut mengatakan, kualitas pengerjaan merupakan kunci suksesnya pembangunan IKN. Karena itu, dirinya melapor ke Presiden agar diizinkan untuk menggunakan tenaga pengawas profesional dari luar negeri.

"Pengawas itu, kita terpaksa dengan segala hormat, pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jangan sampai begitu Presiden ke sana jadi tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut. ■ KAL